



**KEPALA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 2.....TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMANGEDE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tamangede tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
29. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
31. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
49. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
50. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

296);

51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
54. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
56. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
57. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
58. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
59. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
60. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.
61. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Medukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);

62. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07 /2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07 /2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
68. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
69. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
73. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2018 Nomor 20);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
78. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3);
79. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 5);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);

84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

92. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
93. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
94. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
95. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
96. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
99. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
100. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
102. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

Nomor 9);

103. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20);
107. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
109. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
110. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
111. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
112. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
113. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
114. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
115. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

Nomor 2);

116. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 12);
117. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
118. Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 18);
119. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
120. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
121. Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);
122. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);
123. Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 3);
124. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 4);
125. Peraturan Desa Tamangede Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 6);
126. Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 4);
127. Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2025 Nomor 2);

128.Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.694.942.934,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,00 (Nol rupiah) sehingga menjadi Rp 1.694.942.934,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	142.696.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp	142.696.000,00

1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp	1.552.246.934,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.552.246.934,00

1.3. Pendapatan Lain - lain

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah pendapatan lain setelah perubahan	Rp	0,00
Pendapatan setelah perubahan	Rp	0,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	761.121.413,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(3.918.744,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	757.202.669,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	641.265.900,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(95.526.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	545.739.900,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	301.499.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(91.916.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	209.583.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Semula	Rp	31.160.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	8.730.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	39.890.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	182.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	(6.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	176.000.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.728.415.569,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(33.472.635,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	222.103.379,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	37.591.256,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	259.694.635,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	226.222.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	226.222.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	33.472.635,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamangede oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tamangede
Pada tanggal, 31.. Juli 2025

KEPALA DESA TAMANGEDE



Diundangkan di Tamangede

pada tanggal 31 Juli 2025.....

SEKRETARIS DESA TAMANGEDE,



BAYU AIL DWICAHYO

LEMBARAN DESA TAMANGEDE TAHUN 2025 NOMOR 2

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	1.	PENDAPATAN							
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		142.696.000,00		142.696.000,00	0,00		
	4.1.2.	Hasil Aset Desa		142.696.000,00		142.696.000,00	0,00		
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		142.696.000,00		142.696.000,00	0,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.552.246.934,00		1.552.246.934,00	0,00		
	4.2.1.	Dana Desa		1.091.320.000,00		1.091.320.000,00	0,00		
	1.2.1.01.	Dana Desa		1.091.320.000,00		1.091.320.000,00	0,00		
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		107.120.934,00		107.120.934,00	0,00		
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		107.120.934,00		107.120.934,00	0,00		
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		353.806.000,00		353.806.000,00	0,00		
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		353.806.000,00		353.806.000,00	0,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00		
	4.3.6.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00		
	1.3.6.01.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00		
		JUMLAH PENDAPATAN			1.694.942.934,00		1.694.942.934,00	0,00	
	1.1	2.	BELANJA						
			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		781.121.412,00		787.302.869,00	(5.918.744,00)	
			Penyelenggaraan Belanja Stiap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		624.351.412,00		627.121.428,00	2.770.016,00	
		1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 Orang/Bi	49.680.000,00	1 Orang/Bi	49.680.000,00	0,00	ADD, PBH
		1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai		49.680.000,00		49.680.000,00	0,00	
		1.1.01 5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		49.680.000,00		49.680.000,00	0,00	
	1.1.01 5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		41.400.000,00		41.400.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		8.280.000,00		8.280.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8 Orang/Bi	274.146.000,00	8 Orang/Bi	274.146.000,00	0,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		274.146.000,00		274.146.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		274.146.000,00		274.146.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		228.462.000,00		228.462.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		45.684.000,00		45.684.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Orang/Bi	19.258.560,00	9 Orang/Bi	19.258.560,00	0,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		19.258.560,00		19.258.560,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		19.258.560,00		19.258.560,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		1.291.680,00		1.291.680,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		17.966.880,00		17.966.880,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI)	1 Paket	45.927.653,00	1 Paket	45.927.653,00	2.770.015,00	ADD, DLL, PAC
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		45.927.653,00		45.927.653,00	2.770.015,00	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.627.653,00		9.627.653,00	120.015,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		6.437.653,00		6.437.653,00	120.015,00	
1.1.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka		440.000,00		440.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.750.000,00		2.750.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		25.800.000,00		25.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		20.400.000,00		20.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		9.500.000,00		10.100.000,00	600.000,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		6.000.000,00		6.000.000,00	600.000,00	
1.1.04	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		0,00		0,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		1.000.000,00		3.050.000,00	2.050.000,00	
1.1.04	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan		1.000.000,00		3.050.000,00	2.050.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	6 OB	39.483.600,00	6 OB	39.483.600,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		39.483.600,00		39.483.600,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		39.483.600,00		39.483.600,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		38.400.000,00		38.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa		1.083.600,00		1.083.600,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seta	1 Paket	840.000,00	1 Paket	840.000,00	0,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		840.000,00		840.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		840.000,00		840.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		210.000,00		210.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		90.000,00		90.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		540.000,00		540.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29 OB	29.580.000,00	29 OB	29.580.000,00	0,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		29.580.000,00		29.580.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		29.580.000,00		29.580.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		29.580.000,00		29.580.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana D	1 Paket	32.739.600,00	1 Paket	32.739.600,00	0,00	DOS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga		32.739.600,00		32.739.600,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		32.739.600,00		32.739.600,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		32.739.600,00		32.739.600,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan	1 OB	60.000.000,00	1 OB	60.000.000,00	0,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Be		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelol	8 OB	72.696.000,00	8 OB	72.696.000,00	0,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Paket	1.000.000,00	1 Paket	1.000.000,00	0,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		<u>93.545.000,00</u>		<u>86.856.241,00</u>	<u>(6.688.759,00)</u>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Paket	0,00	1 Paket	1.061.241,00	1.061.241,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		1.061.241,00	1.061.241,00	
1.3.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		0,00		1.061.241,00	1.061.241,00	
1.3.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		0,00		1.061.241,00	1.061.241,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1 Paket	93.545.000,00	1 Paket	85.795.000,00	(7.750.000,00)	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		93.545.000,00		85.795.000,00	(7.750.000,00)	
1.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		28.345.000,00		20.595.000,00	(7.750.000,00)	
1.3.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.040.000,00		1.040.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.605.000,00		7.605.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material		400.000,00		400.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		10.000.000,00		2.250.000,00	(7.750.000,00)	
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		7.200.000,00		7.200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		<u>42.225.000,00</u>		<u>42.225.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rambung desa N	1 Paket	11.600.000,00	1 Paket	11.600.000,00	0,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		11.600.000,00		11.600.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.600.000,00		5.600.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1 Paket	27.540.000,00	Paket	27.540.000,00	0,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		27.540.000,00		27.540.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.590.000,00		10.590.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.010.000,00		2.010.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.280.000,00		8.280.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		7.950.000,00		7.950.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.450.000,00		6.450.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDas Perubahan, i	1 Paket	1.500.000,00	1 Paket	1.500.000,00	0,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Ma:	1 Paket	1.585.000,00	1 Paket	1.585.000,00	0,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.585.000,00		1.585.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.585.000,00		1.585.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		760.000,00		760.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		825.000,00		825.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		641.265.900,00		646.739.900,00	(95.526.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		32.612.000,00		47.472.000,00	14.860.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPN/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik I	1 Paket	32.612.000,00	1 Paket	47.472.000,00	14.860.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		32.612.000,00		34.972.000,00	2.360.000,00	
2.1.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		20.292.000,00		21.342.000,00	1.050.000,00	
2.1.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.872.000,00		2.872.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		850.000,00		850.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		16.470.000,00		17.520.000,00	1.050.000,00	
2.1.01	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		0,00		500.000,00	500.000,00	
2.1.01	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		0,00		500.000,00	500.000,00	
2.1.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.620.000,00		4.620.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		4.620.000,00		4.620.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		0,00		810.000,00	810.000,00	
2.1.01	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan		0,00		810.000,00	810.000,00	
2.1.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		6.950.000,00		6.950.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		6.950.000,00		6.950.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal		0,00		12.500.000,00	12.500.000,00	
2.1.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		0,00		12.500.000,00	12.500.000,00	
2.1.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		0,00		12.500.000,00	12.500.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		141.145.900,00		143.745.900,00	1.600.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen	1 Pos	10.500.000,00	1 Pos	10.500.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.500.000,00		10.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia,	5 POS	98.915.900,00	5 POS	98.915.900,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		98.915.900,00		98.915.900,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		71.165.900,00		71.165.900,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		355.900,00		355.900,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		70.710.000,00		70.710.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		750.000,00		750.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		27.000.000,00		27.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		27.000.000,00		27.000.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber)	1 Paket	4.640.000,00	1 Paket	4.640.000,00	0,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.640.000,00		4.640.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.140.000,00		2.140.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.890.000,00		1.890.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Dana Slaga Kesehatan	1 Paket	20.540.000,00	1 Paket	20.540.000,00	0,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.540.000,00		20.540.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.140.000,00		9.140.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.800.000,00		9.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		9.600.000,00		9.600.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Paket	8.550.000,00	1 Paket	8.550.000,00	0,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.550.000,00		8.550.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.800.000,00		2.800.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	Unit	0,00	2 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal		0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
2.2.09	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
2.2.09	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		378.064.000,00		280.698.000,00	(117.386.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengamanan Jalan Lingkungan	165 Meter	100.963.000,00	95 Meter	100.963.000,00	0,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal		100.963.000,00		100.963.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		100.963.000,00		100.963.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		12.430.000,00		12.430.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		85.700.000,00		85.700.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		333.000,00		333.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengamanan Jalan Usaha Tani	200 Meter	226.222.000,00	200 Meter	99.726.000,00	(126.496.000,00)	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		226.222.000,00		99.726.000,00	(126.496.000,00)	
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		226.222.000,00		99.726.000,00	(126.496.000,00)	
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		3.400.000,00		1.700.000,00	(1.700.000,00)	
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		62.270.000,00		27.720.000,00	(34.550.000,00)	
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		158.952.000,00		69.506.000,00	(89.446.000,00)	
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		1.600.000,00		800.000,00	(800.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong	100 Meter	50.899.000,00	100 Meter	50.009.000,00	9.110.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		50.899.000,00		50.009.000,00	9.110.000,00	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		50.899.000,00		50.009.000,00	9.110.000,00	
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		13.870.000,00		15.060.000,00	1.190.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		34.529.000,00		42.049.000,00	7.520.000,00	
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		800.000,00		1.200.000,00	400.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		<u>89.424.000,00</u>		<u>89.424.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limba	60 Meter	<u>89.424.000,00</u>	190 Meter	<u>89.424.000,00</u>	<u>0,00</u>	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal		89.424.000,00		89.424.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		<u>63.424.000,00</u>		<u>89.424.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.16	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Keg		1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		23.860.000,00		23.860.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		63.064.000,00		63.064.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		<u>0,00</u>		<u>5.400.000,00</u>	<u>5.400.000,00</u>	
2.6.02		Penyediaan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	Paket	<u>0,00</u>	1 Paket	<u>5.400.000,00</u>	<u>5.400.000,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		5.400.000,00	5.400.000,00	
2.6.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		<u>0,00</u>		<u>5.400.000,00</u>	<u>5.400.000,00</u>	
2.6.02	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		0,00		5.400.000,00	5.400.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>		<u>201.489.000,00</u>		<u>209.053.000,00</u>	<u>(7.564.000,00)</u>	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>128.243.000,00</u>		<u>128.243.000,00</u>	<u>10.200.000,00</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tk	Kali	<u>0,00</u>	4 Kali	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		<u>0,00</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.3.01	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik D	Unit	<u>0,00</u>	1 Unit	<u>5.300.000,00</u>	<u>5.300.000,00</u>	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00		300.000,00	300.000,00	
3.3.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		<u>0,00</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	
3.3.04	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya		0,00		300.000,00	300.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.04	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		<u>0,00</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.3.04	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin		0,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemu	1 Unit	<u>173.943.000,00</u>	1 Unit	<u>173.943.000,00</u>	<u>0,00</u>	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.05	5.3.	Belanja Modal		173.943.000,00		173.943.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		173.943.000,00		173.943.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		30.140.000,00		30.140.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		137.803.000,00		137.803.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1 Paket	14.300.000,00	1 Paket	14.300.000,00	0,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		14.300.000,00		14.300.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.800.000,00		10.800.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		8.250.000,00		8.250.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		113.366.000,00		11.040.000,00	(102.216.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPKMD	1 Paket	2.310.000,00	1 Paket	2.310.000,00	0,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.310.000,00		2.310.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		710.000,00		710.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		230.000,00		230.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		480.000,00		480.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	8.730.000,00	1 Paket	8.730.000,00	0,00	ADD, PAD, PBI
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.730.000,00		8.730.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.730.000,00		8.730.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.730.000,00		8.730.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	60 Orang	102.216.000,00	60 Orang	0,00	(102.216.000,00)	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		102.216.000,00		0,00	(102.216.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		17.616.000,00		0,00	(17.616.000,00)	
3.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.836.000,00		0,00	(2.836.000,00)	
3.4.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		180.000,00		0,00	(180.000,00)	
3.4.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.400.000,00		0,00	(5.400.000,00)	
3.4.04	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		200.000,00		0,00	(200.000,00)	
3.4.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		9.000.000,00		0,00	(9.000.000,00)	
3.4.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		18.800.000,00		0,00	(18.800.000,00)	
3.4.04	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.000.000,00		0,00	(3.000.000,00)	
3.4.04	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		15.600.000,00		0,00	(15.600.000,00)	
3.4.04	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		66.000.000,00		0,00	(66.000.000,00)	
3.4.04	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		54.000.000,00		0,00	(54.000.000,00)	
3.4.04	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas		12.000.000,00		0,00	(12.000.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		<u>31.160.000,00</u>		<u>39.890.000,00</u>	<u>8.730.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>6.600.000,00</u>		<u>6.100.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tension/Sederhana	100 Meter	6.600.000,00	100 Meter	6.100.000,00	(500.000,00)	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal		6.600.000,00		6.100.000,00	(500.000,00)	
4.2.04	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		6.600.000,00		6.100.000,00	(500.000,00)	
4.2.04	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		6.500.000,00		6.000.000,00	(500.000,00)	
4.2.04	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		<u>8.560.000,00</u>		<u>30.590.000,00</u>	<u>22.030.000,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	50 Orang	8.560.000,00	50 Orang	30.590.000,00	22.030.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.560.000,00		30.590.000,00	22.030.000,00	
4.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.580.000,00		24.090.000,00	18.510.000,00	
4.4.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.060.000,00		1.060.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		150.000,00		150.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.250.000,00		4.950.000,00	2.700.000,00	
4.4.01	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material		2.000.000,00		17.830.000,00	15.830.000,00	
4.4.01	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		100.000,00		100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium		500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	
4.4.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	
4.4.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.500.000,00		5.000.000,00	2.500.000,00	
4.4.01	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		2.500.000,00		5.000.000,00	2.500.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		16.000.000,00		3.200.000,00	(12.800.000,00)	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekon	25 Orang	16.000.000,00	25 Orang	3.200.000,00	(12.800.000,00)	DDS
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa		16.000.000,00		3.200.000,00	(12.800.000,00)	
4.7.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		16.000.000,00		3.200.000,00	(12.800.000,00)	
4.7.04	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan		16.000.000,00		3.200.000,00	(12.800.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES		182.000.000,00		176.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	4.000.000,00	(6.000.000,00)	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.2.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.2.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		182.000.000,00		182.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	540 KPM	182.000.000,00	45 KPM	182.000.000,00	0,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga		182.000.000,00		182.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga		182.000.000,00		182.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga		182.000.000,00		182.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		1.917.046.313,00		1.728.415.569,00	(188.630.744,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		(222.103.379,00)		(33.472.635,00)	188.630.744,00	
3.		PEMBIAYAAN						

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan		222.103.379,00		259.694.635,00	37.591.256,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		222.103.379,00		259.694.635,00	37.591.256,00	
	3.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya		222.103.379,00		259.694.635,00	37.591.256,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		0,00		226.222.000,00	226.222.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		0,00		226.222.000,00	226.222.000,00	
	3.2.2.01	Penyertaan Modal Desa		0,00		226.222.000,00	226.222.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		222.103.379,00		33.472.635,00	263.813.256,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

TAMANGEDE, 31 Juli 2025

KEPALA DESA

